

Judul : Di Balik Penurunan Ongkos Haji 2026
Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Di Balik Penurunan Ongkos Haji 2026

Meskipun pemerintah berusaha menahan kenaikan total biaya penyelenggaraan ibadah haji, beban riil yang ditanggung anggota jemaah saat ini masih lebih besar dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Iqbal Basyari

Setiap tahun, penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPJH menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena menyangkut biaya ibadah yang sakral bagi umat Islam, melainkan juga karena mencerminkan dinamika ekonomi nasional, kebijakan fiskal, dan arah pembangunan Indonesia dengan Arab Saudi.

Sekitar tujuh bulan menjelang musim haji 2026, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR mulai membahas besaran BPJH untuk tahun depan. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (27/10/2025), pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan rata-rata BPJH sebesar Rp 88,4 juta per anggota jemaah.

Dari total tersebut, biaya yang harus dibayar langsung anggota jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (biyah) sebesar Rp 54,92 juta atau 62 persen dari total biaya. Sisanya, Rp 33,48 juta atau 38 persen, akan ditanggung melalui dana nilai manfaat hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Posisi terbesar biyah masih berasal dari biaya penerbangan, yakni Rp 33,1 juta per orang untuk tiket dari berbagai embarkasi di Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Selain itu, biaya akomodasi di Mekkah diperkirakan Rp 14,65 juta, di Madinah Rp 3,87 juta, dan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per orang. Adapun komponen dari dana nilai manfaat dipakai untuk menutupi layanan akomodasi tambahan, konsumsi, transportasi dalam negeri, serta operasionalisasi penyelenggaraan di Arab Saudi.

Jika dibandingkan dengan BPJH 2025 sebesar Rp 89,41 juta, usulan biaya 2026 sedikit lebih rendah. Tahun lalu, anggota jemaah membayar rata-rata Rp 55,4 juta, sedangkan nilai manfaat menanggung Rp

33,9 juta. Artinya, beban per orang pada 2026 turun sekitar Rp 1 juta.

Pada Rabu (29/10), DPR bersama pemerintah menyepakati BPJH tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi rata-rata Rp 87,4 juta per anggota jemaah atau turun lagi Rp 1 juta dari usulan pemerintah. Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung oleh anggota jemaah ditetapkan Rp 54,19 juta, turun Rp 1,23 juta dibandingkan dengan tahun lalu.

"Biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung langsung rata-rata per anggota jemaah Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPJH. Biaya ini untuk penerbangan, sebagian akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup," ujar Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen.

Ini menambahkan, ongkos haji 2026 bisa turun Rp 2 juta ketimbang 2025 setelah perhitungan manual terhadap komponen biaya. Di situ, tim Panitia BPJH menemukan ruang efisiensi tambahan.

"Kami melihat masih ada celah untuk diturunkan. Setelah negosiasi dan melihat bukti yang disodorkan, akhirnya disepakati tambahan penurunan Rp 1 juta lagi," ujar Marwan.

Naik turun

Melihat perjalanan biaya haji sejak 2015, ada tren menarik yang naik-turun secara nominal, tetapi cenderung meningkat dalam jangka panjang. Pada 2015, total BPJH berada di kisaran Rp 61,5 juta per anggota jemaah. Dari jumlah itu, jemaah membayar Rp 37,49 juta, sementara sisanya ditanggung oleh nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji.

Setahun kemudian, 2016, biaya yang dibayar jemaah turun sedikit menjadi Rp 34,6



Calon jemaah haji mengantre melakukan perekaman pembuatan paspor secara kolektif di Pondok Pesantren Daarul Hikmah, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (15/10/2025).

juta dan total BPJH menyusut ke Rp 60 juta. Tahun 2017 dan 2018 relatif stabil, masing-masing di kisaran Rp 61 juta hingga Rp 68 juta.

Namun, memasuki 2019, biaya mulai meningkat, mencapai Rp 69 juta per anggota jemaah. Kenaikan tajam terjadi setelah pandemi Covid-19. Tahun 2022, total BPJH melonjak drastis menjadi Rp 97,79 juta karena peningkatan tarif layanan di Arab Saudi dan penyesuaian harga tiket pesawat.

Tahun 2023, total biaya turun menjadi Rp 90 juta, tetapi beban yang dibayar anggota jemaah justru meningkat ke Rp 49,9 juta. Tren ini berlanjut

pada 2024 ketika anggota jemaah membayar rata-rata Rp 56,04 juta dari total Rp 93,41 juta.

Baru pada 2025, pemerintah bersama DPR mulai melakukan rasionalisasi besar. Total biaya diturunkan menjadi Rp 89,41 juta, dengan porsi pembayaran jemaah Rp 55,4 juta. Kini, 2026 menjadi tahun kedua biaya haji menurun dari total Rp 88,4 juta, dengan Rp 54,92 juta di antaranya dibayar jemaah.

Secara nominal, biaya haji memang tak melonjak setinggi pascapandemi. Namun, jika dilihat dari sisi jemaah, proporsi pembayaran justru makin berat. Jika pada 2015 jemaah ha-

nya menanggung sekitar 61 persen dari total biaya, kini persentasenya telah naik menjadi 62 persen. Dengan demikian, meski pemerintah berusaha menahan kenaikan total BPJH, beban riil di pundak jemaah kini lebih besar dibandingkan dengan satu dekade lalu.

Kenaikan biaya transportasi, tarif hotel, dan inflasi global di Arab Saudi menjadi faktor yang sulit dikendalikan. Sementara hasil pengelolaan nilai manfaat dana haji tak lagi mampu memberikan subsidi sebesar sebelumnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sejumlah langkah dilakukan untuk terus

menekan biaya haji. Salah satunya dengan menekan biaya untuk penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi.

Dahnil menjelaskan, penyelesaian pesawat akan dilakukan secara *multijawab* atau kontrak jangka panjang, bukan kontrak setiap tahun. Kontrak akan berdurasi selama tiga tahun dengan evaluasi setiap tahun. Langkah ini diyakini dapat menurunkan komponen biaya penerbangan.

Selain itu, kontrak lainnya, termasuk akomodasi, juga akan dilakukan dengan model serupa. "Tu untuk mencegah, misalnya, potensi kecurangan, potensi *cashback*, yang karena setiap tahun ada tim pengada-

an atau penyediaan dengan cara memperlajari, maka peluang untuk *cashback* segala macam bisa berkurang," katanya.

Selain itu, penyelenggara haji akan menyeragamkan harga avtur di seluruh bandara embarkasi sesuai dengan harga di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan harga terendah di Indonesia. Skema ini sebelumnya pernah diterapkan pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 dan dinilai cukup efektif menekan biaya bahan bakar.

Dengan segala langkah efisiensi dan penurunan biaya itu, Marwan mewanti-wanti, mutu pelayanan tetap dipertahankan. Jarak hotel ke Masjidil Haram serta standar konsumsi "rasa nusantara", misalnya, tetap dipertahankan sesuai kesepakatan sebelumnya.

"Kualitas tetap kami kunci. Bahan baku makanan dari Indonesia, *chef* nya pun dari Indonesia," tutur Marwan.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Walid, berpandangan, penurunan ongkos haji merupakan langkah positif. Namun, ruang efisiensi masih terbuka karena ada sejumlah aspek yang dapat dibahas lebih lanjut agar biaya bisa ditekan lebih besar lagi.

Ia pun berharap agar pada tahun-tahun mendatang penurunan biaya haji lebih banyak menyuntik porsi ongkos haji yang dibayarkan jemaah. Dengan demikian, selain jemaah haji kian ringan, seiring upaya pemerintah menekan biaya haji secara keseluruhan.

Terlepas dari upaya menurunkan ongkos haji, penyelenggaraan ibadah haji 2026 merupakan batu ujian bagi Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ini karena untuk kali pertama penyelenggaraan haji ditangani khusus oleh Kementerian Haji dan Umrah.